

## **KAMPANYE**

**2018**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 012/PL.03.4-Kpt/3209/KPU-Kab/I/2018 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2018**

**ABSTRAK :** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa KPU Kabupaten menetapkan Keputusan KPU Kabupaten tentang pedoman teknis pelaksanaan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan berpedoman pada PKPU sebagaimana dimaksud;  
Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Cirebon;

#### **Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Cirebon ini adalah :**

UU Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara RI tanggal 4 juli 1950) jo UU Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara RI Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4744), dan UU Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara RI) Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4010); UU Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara RI tanggal 8 agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah UU Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2851); UU Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara RI tanggal 14 agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan UU Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara RI Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 551); UU Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3663); UU Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Depok dan Kotamadya Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3828); UU Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4116) --

; UU Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya Cimahi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4117); UU Nomor 27 Nomor 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4246); UU Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4688); UU Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5363); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5898); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109); PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPUP Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 012/PL.03.4-Kpt/3209/KPU-Kab/I/2018 diatur tentang :**

**Menetapkan Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran.**

CATATAN

- Keputusan KPU Kab Cirebon ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 30 Januari 2018.
- Lampiran 44 halaman.

